

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang seringkali diperdebatkan. Sejak tahun 2002, mayoritas para aktivis politik, tokoh-tokoh perempuan dalam partai politik, kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) setuju akan perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Ada banyak alasan yang menjadikan isu ini menjadi topik perdebatan yang kian menghangat di Indonesia. *Pertama*, keterwakilan politik perempuan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal masih sangat rendah. Secara historis perjalanan perempuan di dalam parlemen tidak pernah melebihi angka 18 persen di DPR. Angka itu pun baru dapat diperoleh pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 lalu. Bahkan, DPR RI pada Periode Konstituante 1956-1959 pernah menorehkan angka terendah jumlah kursi perempuan di parlemen dengan angka 5,1 persen.¹ Tidak hanya di tingkat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga mengalami persoalan yang sama. Hasil pemilu 2009 lalu keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi secara rata-rata adalah 16

¹ Aisah Putri Budiatri, “*Ringkasan Laporan Penelitian Perempuan dan Politik, Studi: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009 di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram, dan DPRD Kabupaten Minahasa utara*”, naskah tidak diterbitkan, Jakarta: WRI dan IDRC, 2010, hlm.7.

persen, sementara DPRD Kabupaten/Kota adalah 12 persen.² *Kedua*, berkaitan dengan *alot*-nya proses transisi demokrasi di Indonesia. Transisi tersebut sebenarnya memberikan peluang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Telah banyak LSM perempuan yang bergerak di bidang politik dan perempuan saat ini mulai berusaha meningkatkan kesadaran politik kaumnya. Oleh karena itu, kini lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang kuat untuk menjadikan isu kepentingan perempuan (jender) sebagai unsur yang penting di dalam proses demokrasi.

Isu kesetaraan jender juga mendapatkan perhatian yang luas dalam perdebatan politik di Indonesia menjelang pemilu tahun 2004. Hal ini berdampak pada penerapan UU pemilu yang telah mengakomodasi aksi afirmasi kuota minimal 30 persen pencalonan perempuan dalam daftar. Aksi afirmasi dalam UU pemilu ini berkembang pada pemilu 2009 dengan diterapkannya kolaborasi sistem kuota dengan sistem *zipper*. Perempuan tidak hanya dicalonkan dengan angka kuota 30 persen, tetapi juga harus disertakan dalam daftar minimal satu perempuan di antara tiga calon. Sayangnya, kebijakan afirmasi ini tidak lagi berlaku sejak diterapkannya *judicial review* atas UU Pemilu No.12 Tahun 2003 di penghujung tahun 2008.

Rendahnya kemampuan partai politik atas kader perempuan yang berkualitas seharusnya tidak lagi menjadi persoalan karena partai politik

² Pusat Kajian Ilmu Politik, Naskah Rekomendasi Kebijakan: *Representasi Perempuan Dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu*, Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010, hlm.3.

umumnya telah memiliki departemen. Divisi dan organisasi sayap perempuan dalam struktur partai. Melalui struktur partai tersebut, parpol memiliki banyak peluang untuk memperluas jaringan kader perempuan dan mengoptimalkan kader perempuan untuk kegiatan partai, termasuk dalam pemilu. Dengan demikian, inti persoalan atas rendahnya pencalonan perempuan dalam parpol adalah “keengganan” dan “ketidakmampuan” partai dalam memaksimalkan organisasi sayap perempuan dan mengembangkan kemampuan kader perempuan yang sudah ada. Hal ini sudah selayaknya menjadi persoalan parpol yang perlu dicermati, khususnya apabila ingin meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun demikian, persoalan keterlibatan perempuan di dalam pemilu tidak hanya pada permasalahan internal parpol, namun juga persoalan di luar parpol yang meliputi situasi dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Banyak LSM seperti Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), Jaringan Perempuan dan Politik (JPP), dan Solidaritas Perempuan (SP); semuanya bekerja keras untuk memberdayakan kaum perempuan. LSM-LSM memiliki jaringan yang luas dan aktivitas mereka menembus batas-batas wilayah, baik provinsi maupun daerah tingkat satu di Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan partisipasi mereka sangat bergantung pada kemauan parpol untuk merekrut ‘perempuan-perempuan potensial’ yang berasal dari luar basis tradisional mereka.

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari, dan dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat. Pada saat yang sama komunikasi politik juga dapat melahirkan, memelihara, dan mewariskan budaya politik, sehingga dengan memperhatikan struktur pesan serta pola-pola komunikasi politik yang diperankannya, maka dapat dianalisis budaya politik suatu masyarakat. Menurut Rush dan Althoff (1997), komunikasi politik – transmisi informasi yang relevan secara politis dari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dengan sistem politik merupakan unsur dinamis suatu sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi, serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi.³

Dari proses politik seperti itu, terlihat kemudian posisi penting komunikasi politik terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfungsikan kekuasaan.

Begitu pula dengan komunikasi politik yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kandidat calon legislatif perempuan memiliki cara dan strategi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo khususnya untuk DAPIL II wilayah Lumbang-Tongas-Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Sehingga menimbulkan efek dan feedback untuk masyarakat demi lancarnya proses pemilihan yang akan di laksanakan tahun 2014 mendatang.

³ Atwar Bajari & S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual Teori Dan Praktik Komunikasi Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 413.

Salah satu kandidat calon legislatif perempuan Kabupaten Probolinggo yaitu Nailun Ni'mah. Untuk DAPIL II wilayah Lumbang - Tongas - Sumberasih partai PKB Kabupaten Probolinggo. Beliau yang memiliki profesi sebagai guru dan kepala Paud/RA (TK). Beliau juga mengajar Madrasah Diniyah di desa Tandonsentul. Selain itu beliau juga aktif di organisasi seperti Musimat NU dan pengurus cabang PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Probolinggo.

Nailun Ni'mah mencalonkan sebagai kandidat calon legislatif perempuan DAPIL II partai PKB Kabupaten Probolinggo bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan untuk keterwakilan perempuan anggota Muslimat dari PCNU dan PC Muslimat Kabupaten Probolinggo. Alasan beliau dicalonkan sebagai kandidat perempuan yaitu untuk mengapresiasi suara perempuan dan keterwakilan dari Nabiyin/Muslimat NU.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membawa kepentingan dan kebutuhan perempuan di dalam kebijakan. Namun di lain pihak, sistem politik dan parpol masih menjadi hambatan atas keterlibatan perempuan dalam politik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah komunikasi politik perempuan pada pemilihan calon legislatif DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses komunikasi politik perempuan pada pemilihan calon legislatif DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo?
2. Apa motif perempuan dalam pertarungan calon legislatif perempuan DAPIL II partai PKB Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana pola komunikasi politik yang dijalankan oleh calon legislatif perempuan DAPIL II partai PKB Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan berlangsung ialah untuk mengetahui:

1. Proses komunikasi politik perempuan pada pemilihan calon legislatif DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo.
2. Motif perempuan dalam pertarungan calon legislatif perempuan DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo.
3. Pola komunikasi politik yang dijalankan oleh calon legislatif perempuan DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai sarana pengembangan teori dalam kajian ilmu komunikasi pada praktek komunikasi politik pada moment pemilihan calon legislatif.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis yang diperoleh ialah sebagai wawasan dan pengetahuan tentang prilaku politik perempuan.

E. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Maksud kajian hasil penelitian terdahulu adalah memuat tentang hasil penelitian yang pernah ada. Sepanjang melakukan upaya penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang coba diambil titik singgung persamaan dengan penelitian yang berjudul “Komunikasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Calon legislatif DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo”, peneliti menemukan kajian hasil penelitian terdahulu seperti contoh dibawah ini:

Tabel 1.1
Kajian hasil penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Jenis karya	Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil temuan penelitian	Tujuan penelitian	Perbedaan
1	Fajar Muharram	Skripsi	2012	Deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan interaksionisme	1. Komunikasi politik walikota Surabaya Bambang	Untuk mendeskripsikan dan memahami proses	Penelitian dalam komunikasi politik ini lebih

				simbolik	<p>Dwi Hartono mengenai reformasi birokrasi dinamika politik kota Surabaya. Dinamika politik nasional bangsa ini seakan mempengaruhi konstalasi politik di tingkat daerah maupun kota</p> <p>2. Supermasi hukum dinamika politik kota Surabaya membuat bambang dwi hartono untuk aktif bergerak dalam mencari seluk beluk persoalan dan penyelesaian dari berbagai problematika kota ini</p> <p>3. Pelayanan publik membangun sistem</p>	komunikasi politik walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono dalam birokrasi pemerintahan kota surabaya	mengarah kepada pemilihan calon legislatif perempuan yang ikut bergelut di dalam politik
--	--	--	--	----------	--	---	--

					dalam pemerintahan kota memang tidak serta merta dilakukan dalam bentuk yang serba cepat		
2	Imron Hamzah	Skripsi	2010	Kualitatif	<p>1. Proses komunikasi politik partai demokrat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kab. Rembang tahun 2010 selesai pada 26 april, partai demokrat dalam bentuk bahasa komunikasi politiknya membuat pesan jargon, pesan yang berupa jargon kemudian ditransmisikan kepada khalayak</p> <p>2. Ada 3 jenis media komunikasi</p>	<p>1. Ingin mengetahui proses komunikasi politik partai demokrat dalam pemilihan kepala daerah di kab. Rembang tahun 2010</p> <p>2. Ingin mengetahui pola komunikasi politik yang diterapkan partai demokrat dalam pemilihan kepala daerah di kab. Rembang tahun 2010</p>	Komunikasi politik disini lebih mengarah kepada proses dan strategi pemilihan caleg perempuan di kab. probolinggo

					yang digunakan dalam kegiatan komunikasi politik partai demokrat. Ketiga media tersebut adalah: media massa, media komunikasi interpersonal dan media komunikasi organisasi		
3	Firdaus	Skripsi	2012	Kualitatif	Fokus pada politik etnis atau politik perbedaan karena secara kultur masyarakat Bajo Sapeken tidak ada keterkaitan etnis dengan suku Madura meskipun secara administrasi politik masuk wilayah Sumenep, dan pada skala besar jika dihadapkan pada wilayah Sumenep yang mayoritas	1. Mengidentifikasi motif yang melatarbelakangi etnis Bajo Sapeken terlibat dalam politik praktis pada pemilu legislatif tahun 2009 di Sumenep 2. Menganalisa dan mengidentifikasi peran anggota dewan etnis Bajo	Komunikasi politik disini lebih mengarah kepada caleg perempuan yang mencalonkan sebagai anggota DPR kab. Probolinggo

					Madura maka masyarakat Bajo Sapeken adalah masyarakat minoritas tapi mampu menempatkan dua wakilnya di DPRD kab. Sumenep	3. Sapeken dalam arena politik di DPRD kab. Sumenep Menganalisa konsistensi anggota dewan etnis Bajo dan kepentingan partai politik	
--	--	--	--	--	--	---	--

F. Definisi Konsep

Untuk membatasi pembahasan yang menjadi konsep dari penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan ataupun interpretasi/penafsiran makna yang terlalu luas terkait judul penelitian, maka penting untuk dibuat definisi dari konsep penelitian

1. Komunikasi Politik Perempuan

Terminologi komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu *Communico* yang artinya membagi, dan *Communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Laswell dengan menanyakan “siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya”. Selain itu, Everett M. Rogers dan D. Lawrence Kincaid membuat definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua

orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.⁴

Asal mula kata politik berasal dari kata “*polis*” yang berarti Negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi consensus nasional, serta kemudian kekuatan rakyat. Politik merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga sebagai seni.⁵

Komunikasi politik menurut Dahlan (1989) ialah suatu bidang atau disiplin ilmu yang menelaah prilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap prilaku politik. Dengan demikian, komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk

⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 20.

⁵ Inu Kencana Syafie & Azhari, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.6.

membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.⁶

Seorang pemimpin (komunikator politik) dituntut untuk dapat menjalankan peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila mampu menjalankan proses komunikasi politik dengan baik, karena pemimpin (komunikator politik) dalam menjalankan kepemimpinan berada dalam lokus suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Disadari atau tidak, pemimpin adalah pihak yang membuat sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang menciptakan pemimpin.⁷

Saat ini komitmen negara untuk memajukan kaum perempuan tercermin dalam UU Nomer 25 tahun 2000 tentang Propenas yang secara eksplisit telah menjelaskan tujuan pembangunan yang harus juga mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini berarti setiap kebijakan pembangunan harus dikembangkan secara responsif gender melalui strategi pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan. Untuk mendukung implementasi di tingkat daerah, telah lahir pula Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 35.

⁷ Ardial, *Kompol* (Jakarta: PT Indeks, 2010), hlm. 74.

Komitmen negara di atas secara jelas menunjukkan bahwa pergerakan isu-isu perempuan yang diperjuangkan oleh kelompok perempuan telah memasuki level negara baik di tingkat nasional maupun lokal, yang melibatkan kekuasaan negara termasuk jajaran birokrasinya dari tingkat nasional sampai daerah. Mekanisme pengarusutamaan gender yang didukung oleh *national machineries*, yaitu seluruh jajaran birokrasi negara, juga menunjukkan adanya aliansi yang dibangun oleh para kelompok perempuan dengan negara untuk bekerja bersama-sama meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia.

2. Pemilihan calon legislatif

Dalam Wikipedia (2009) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. DPR memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, DPR juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan fungsinya sebagai legislatif maka anggota DPR juga dikenal sebagai anggota legislatif.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KPU, 2009). Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KPU, 2009). Mengingat bahwa anggota DPR dikenal juga dengan sebutan anggota legislatif, maka dalam hal pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disebut dengan pemilu legislatif.

Syarat menjadi calon legislatif

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon legislatif yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- h. Sehat jasmani dan rohani
- i. Terdaftar sebagai pemilih
- j. Bersedia bekerja penuh waktu

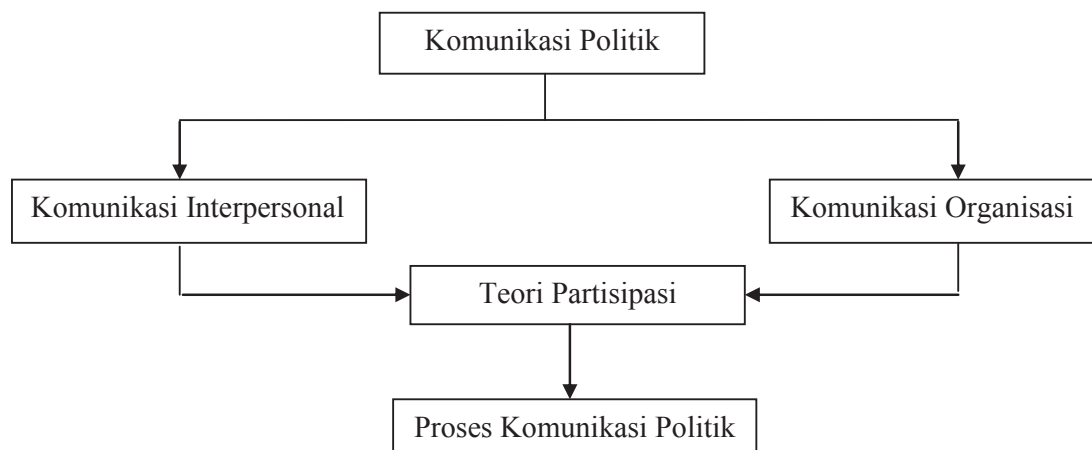
- k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Jadi pemilihan calon legislatif secara langsung terkait dengan peran serta masyarakatnya dalam memberikan dukungan suara kepada partai politik dan kandidat yang ada. Proses Pemilihan Legislatif Langsung ini akan menghadirkan partisipasi politik masyarakat. Dan banyak faktor yang akan mempengaruhi preferensi kandidat dari pemilih tersebut.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk menjelaskan alur penelitian, maka penulis memberikan kerangka pikir penelitian yang berkaitan dengan “komunikasi politik perempuan pada pemilihan calon legislatif DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo”.

Kerangka pikir peneliti pada penelitian ini mengilustrasikan dengan skema dibawah ini:



Bagan 1.1
Kerangka Pikir Penelitian

Dari skematik alur gambar diatas, komunikasi politik di dalamnya memiliki beberapa macam komunikasi, salah satunya yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Komunikasi interpersonal terjadi ketika mereka ingin melakukan kegiatan politik atau pemilihan calon legislatif ataupun ketika diantara mereka ada yang memiliki hubungan yang baik antara satu orang dengan satu orang lainnya. Sedangkan komunikasi organisasi terjadi ketika suatu kesatuan atau perkumpulan yang terdiri atas orang-orang atau bagian-bagian yang di dalamnya terdapat aktivitas kerja sama berdasarkan pola dan aturan-aturan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi komunikasi politik mereka saling berkaitan dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi

Teori Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Gabriel A. Almond mencoba mengungkapkan secara garis besar bentuk-bentuk partisipasi politik yang pernah digunakan di berbagai Negara. Dari berbagai bentuk sempat di inventarisasi kemudian diklasifikasikan dalam dua pola yang umum sifatnya. Pertama, pola konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik berdasarkan kondisi dan tata cara menurut adat (peraturan setempat) yang dianggap umum dan berlangsung dalam demokrasi modern. Kedua, pola partisipasi politik non konvensional merupakan beberapa bentuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner.⁸

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, tindakan, motivasi dan lain sebagainya. Secara holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁹

Peneliti menggunakan pendekatan ini, karena penelitian bermula dari proses pengamatan awal di lapangan serta bisa memahami fenomena yang belum banyak diketahui sampai saat ini

⁸Khoirul Anwar, *Perilaku Partai Politik*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 19.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2002), hlm. 6.

secara mendalam, karena teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.¹⁰

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskripsif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.¹¹

2. Subyek, Obyek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian ini adalah terkait dengan lingkungan sekitar latar penelitian dan orang-orang yang ditunjuk oleh peneliti yang dianggap memiliki pengetahuan luas yang memadai terkait dengan obyek penelitian. Adapun subyek penelitian ini adalah calon legislatif perempuan DAPIL II partai PKB Kabupaten Probolinggo dan beberapa orang yang ikut berpartisipasi dalam proses pencalonan anggota legislatif perempuan DAPIL II partai PKB Kabupaten Probolinggo.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 174.

¹¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

Tabel 1.2
Informan DAPIL II Kab. Probolinggo¹²

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Profesi	Alasan
1.	Nailun Ni'mah	37 tahun	Perempuan	Guru dan Aktivis	Kandidat Caleg Perempuan DAPIL II Kab. Probolinggo
2.	KH. Saiful Hadi	50 tahun	Laki-laki	Ketua PCNU	Ketua PCNU Kab. Probolinggo
3.	Izzah Mahmudah	35 tahun	Perempuan	PNS	Aktif diorganisasi perempuan
4.	Maulida Yosita	21 tahun	Perempuan	Aktivis	Aktif diorganisasi perempuan
5.	Wildan M.H	40 tahun	Laki-laki	PNS	Partisipan caleg perempuan DAPIL II Kab. Probolinggo

Obyek penelitian ini membahas tentang komunikasi politik perempuan pada pemilihan calon legislatif DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo.

Tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan sumber data, dalam hal ini wilayah DAPIL II Kecamatan Lumbang, Tongas, Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktifitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya, peneliti bisa secara cermat mencoba mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan kesimpulan.

¹² Hasil wawancara dengan Nailun Ni'mah pada 8 Mei 2013

3. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Sumber Data

Jenis data adalah pokok yang akan dicari dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari sumbernya, yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut sebagai key informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹³ Data sekunder merupakan data pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan peneliti yang berupa studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari melalui internet dan buku-buku referensi tentang penelitian ini.

Sumber data adalah orang yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang mana peneliti ingin menentukan informan yang didasarkan pada kriteria pokok penelitian guna menggali data dan informasi berdasarkan tema penelitian. Penentuan jumlah informan dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas serta keragaman fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, sumber data yang diperoleh peneliti, yaitu dari informan calon legislatif perempuan Nailun Ni'mah.

¹³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 128.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan terlibat menurut Becker et al. adalah pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak berperan serta dalam kehidupan orang yang kita teliti. Pengamat terlibat mengikuti orang-orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari mereka, melihat apa yang mereka lakukan, kapan, dengan siapa dan dalam keadaan apa, manayai mereka mengenai tindakan mereka.¹⁴

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan wawancara dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Wawancara dilakukan secara mendalam disini maksudnya adalah menggali data dari informan melalui Tanya jawab dengan korban lebih detail hingga menemukan kejenuhan informasi.

3. Dokumentasi

Yaitu proses melihat kembali data-data dari dokumentasi berupa segala macam bentuk informasi yang berhubungan

¹⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 163.

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

dengan penelitian yang dimaksud dalam bentuk tertulis atau rekaman suara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jenis, sumber data dan teknik pengumpulan data dibawah ini:

Tabel 1.3

No	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Proses Komunikasi Politik Perempuan Pemilihan Calon legislatif DAPIL II partai PKB di Kabupaten Probolinggo	Informan dan Dokumen	Wawancara
2	Profil	Dokumen	Dokumentasi
3	Pengalaman Organisasi	Informan	Wawancara
4	Mekanisme Pencalonan	Informan	Wawancara

4. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahapan peninjauan penelitian lapangan yang mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat usulan berbentuk proposal penelitian dan juga menentukan planning ke depan.

2) Memilih Lapangan Penelitian

Dalam hal ini peneliti mengambil judul komunikasi politik perempuan pada pemilihan calon legislatif DAPIL II partai PKB Kabupaten Probolinggo.

3) Mengurus Perizinan

Peneliti mengumpulkan proposal penelitian kepada program studi Ilmu Komunikasi guna mendapat draf izin penelitian, setelah mendapat surat izin penelitian dari pihak fakultas dakwah, peneliti membawa ke kantor PCNU Kabupaten Probolinggo bersamaan dengan dilampirkan proposal skripsi, selama proses penelitian dan penggarapan laporan skripsi berlangsung.

4) Menentukan Informan

Pada tahap ini peneliti harus bisa menentukan kira-kira siapa saja yang dijadikan informan (orang-orang yang sekiranya berkompetensi untuk memberikan informasi dan faham tentang situasi dan kondisi latar penelitian).

5) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Hal ini penting ketika peneliti ingin melakukan wawancara, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Karena peneliti harus menyiapkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan ketika melakukan wawancara agar validitas data akurat, seperti: *Blocknote*, *Ball Point*, *Tape Recorder*, kamera dan sebagainya. Agar hasil wawancara tercatat dengan baik.

b. Tahap Lapangan

Tahap ini peneliti lebih fokus pada pencarian dan pengumpulan data dilapangan, serta mengamati segala bentuk aktifitas yang ada dilokasi penelitian. Sambil menulis catatan lapangan untuk tahap berikutnya. Meskipun tidak mungkin seseorang melakukan dua hal secara bersamaan, akan tetapi dengan catatan lapangan ini, diharapkan peneliti akan lebih paham dan ingat akan data-data yang diperoleh pada tahapan ini. Untuk mengingat akan informasi dan data-data, peneliti juga dibantu dengan rekaman suara yang telah dilakukan.

c. Penulisan Laporan

Tahap di mana peneliti menuangkan hasil dari penelitian ke dalam suatu laporan. Tahap ini adalah tahap akhir dari seluruh prosedur penelitian, dan disini peneliti dituntut kekreatifannya dalam menulis. Tentunya penulisan laporan sesuai dengan prosedur penelitian, karena penulisan yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula terhadap penelitian. Adapun penulisannya mulai dari tahap pertama yaitu perumusan masalah sampai tahap akhir yaitu analisa data yang ditunjang dengan keabsahan data yang ditulis dalam penulisan yang berbentuk skripsi. Dalam penulisan laporan ini ditunjang sistematika pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berkaitan dengan bagaimana peneliti akan menerapkan prosedur penyelesaian masalah untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah jenis analisis kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Peneliti penghimpun data dengan pengamatan yang seksama dan mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen lainnya yang menunjang.

Penelitian ini akan menggali dan menggabungkan dari sumber data yang tersedia yaitu :

- a. Sumber kepustakaan, maksudnya adalah memperoleh data teoritis dengan cara membaca, mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Sumber lapangan, maksudnya adalah mencari data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian untuk memperoleh data yang konkrit dan valid tentang segala sesuatu yang diselidiki.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- a. Perpanjangan masa penelitian

Penelitian kualitatif membutuhkan waktu yang relatif lama, jika kebutuhan data penelitian dirasa kurang, maka peneliti akan

memperpanjang keterlibatannya dalam latar penelitian untuk melengkapi data dan kroscek data.

b. Trianggulasi

Trianggulasi dilakukan untuk menganalisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris. Dengan cara Trianggulasi sumber dan teori. Trianggulasi sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui key informan.

c. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan untuk mengetahui hal-hal (data) yang belum diteliti oleh peneliti, bisa juga dijadikan sebagai tambahan tentang penjabaran data di lapangan dan sebagai pembanding antara data satu dengan yang lain. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah masukan selama proses penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I

Pendahuluan yang meliputi, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hasil penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka pikir penelitian, dan metode penelitian, yang di dalamnya membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek, obyek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB II

Kajian teoritik dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka dan kajian teori, dalam bab ini peneliti menentukan teori apa yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori partisipasi.

BAB III

Penyajian data dalam bab ini, membahas tentang deskripsi subyek dan lokasi penelitian, dan deskripsi data penelitian.

BAB IV

Analisis data dalam bab ini membahas tentang temuan penelitian dan konfirmasi temuan dengan teori.

BAB V

Penutup dalam bab ini membahas tentang simpulan dan rekomendasi